

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Implementasi Blue Economy terhadap Budi Daya Rumput Laut sebagai Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat Pesisir Desa Tokorondo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah

Holmes Rolandy Kapuy, Kevin, Timotius Garatu, Ratno, Adolf O.S Luballu & Rahmansyah Ismail

Universitas Sintuwu Maroso, Poso

Email: rolandykapuy@gmail.com

Abstract

This study aims to assess the implementation of the blue economy concept in developing seaweed cultivation in Tokorondo Village, Poso Regency, Central Sulawesi. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach, with data sources being primary data and secondary data. The study results indicate that the seaweed farming community has implemented all principles and indicators of the blue economy well and following the concept. Furthermore, the study results indicate that public awareness of implementing the blue economy concept significantly affects the sustainability of the community's economy in Tokorondo Village.

Keywords blue economy, sustainability, keberlanjutan ekonomi.

1. Pendahuluan

Memanfaatkan potensi sumber daya perairan dengan berbasis lingkungan, saat ini dikenal dengan istilah yang lebih populer *blue economy* yaitu sebuah konsep yang pro ekosistem dengan berusaha mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya perairan (Radiarta *et al.*, 2015), Bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan (Pasaribu, 2017). Konsep blue ekonomi didasarkan pada efisiensi dalam mengembangkan kegiatan investasi dan bisnis, serta tetap menjaga keberlangsungan kegiatan dan kelestarian lingkungan laut (Nurhayati, 2013).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.000 buah, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, dan seluas 5.8 juta km² di antara seluruh areal perairan kepulauan tersebut merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), telah menjadikan perairan Indonesia sebagai salah satu lumbung perikanan dunia. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang pesat sejak tahun 2017, telah mengalami kenaikan sebanyak 15.33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 5.15% menjadi 5.95% (Arlu, 2019). Salah satu komoditas yang sangat menjanjikan untuk dijadikan usaha prospektif di wilayah-wilayah pesisir Indonesia adalah rumput laut. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menjadikan budidaya komoditas rumput laut sebagai salah satu program utama dengan mempertimbangkan bahwa lingkungan perairan Indonesia berkesesuaian dengan pertumbuhan berbagai jenis rumput laut yang potensial untuk dijadikan unggulan, permintaan industri pangan

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

dan obat-obatan semakin meningkat baik untuk kebutuhan pasar lokal, nasional maupun untuk permintaan ekspor, relatif bisa dan mudah untuk dibudidayakan (Dahuri, 2005), tidak memerlukan biaya pakan yang mahal dalam pembudidayaannya. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah terciptanya peluang usaha, kesempatan kerja dan sumber penghasilan masyarakat pesisir khususnya untuk daerah-daerah pesisir yang masih jauh tertinggal. Di sisi lain, hamparan budi daya rumput laut sangat berpotensi merehabilitasi keseimbangan ekologi perairan yang semakin tergerus karena eksploitasi sumber laut yang tidak bijak.

Penelitian ini akan mengkaji kegiatan budi daya rumput laut oleh masyarakat Desa Tokorondo diwilayah Pesisir Kabupaten Poso. Budi daya rumput laut ini telah dilakukan oleh masyarakat Desa sejak tahun 2012 untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ada dua jenis rumput laut yang di budi dayakan, yaitu jenis *Spinosum* dan *Cottoni*. Keduanya mempunyai nilai ekonomis yang berbeda, tetapi jenis *Cottoni* merupakan jenis rumput laut yang memiliki nilai jual yang tinggi jika dibandingkan dengan *Spinosium*. Rumput laut merupakan pilihan sebagai salah satu komodoti ekspor yang mudah di budi dayakan serta dapat menyerap tenaga kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa. Berdasarkan profil perikanan pada tahun 2023 bahwa jumlah produksi budi daya rumput laut *Eucheuma Cottoni* di wilayah Poso Pesisir sebesar 2.069.600 kilo gram. Usaha tani rumput laut di pesisir Desa Tokorondo tampaknya memiliki arti yang sangat penting, karena langsung berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Usaha tani rumput laut memiliki peluang yang sangat bagus dalam membantu menciptakan lapangan kerja dan sebagai sumber pendapatan.

Berdasarkan jumlah produksi tahun 2023 seharusnya dapat pula di implementasikan dengan konsep pemanfaatan sumber daya perairan berbasis lingkungan yang ramah. Selain dapat memproduksi, masyarakat pesisir Desa Tokorondo dapat pula menjaga ekosistem perairan agar mempertahankan keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Artinya masyarakat harus mengimplementasikan konsep *blue economy* demi keseimbangan lingkungan dan peningkatan produksi rumput laut.

Blue economy merupakan sebuah produk integrasi dari kegiatan industrialisasi perikanan yang dibangun secara berkesinambungan dan berorientasi pasar ekspor, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh komoditas hasil perikanan antara lain traceability produk dengan mengutamakan biosekuritas di dalam setiap proses kegiatan budidaya, terkait dengan penginputan kegiatan budidaya terkait media air yang digunakan, sarana dan prasarana dalam kegiatan, proses budi daya serta *output* produk budi daya yang mengikuti standar keamanan. Konsep *blue economy* terdiri dari beberapa indikator yaitu efisiensi alam, *zona waste*, kepedulian sosial dan *multiple revenue*. Konsep *blue economy* di kembangkan untuk menjawab tantangan bahwa sistem ekonomi cenderung eksploitatif dan merusak lingkungan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan sebuah model ekonomi baru dalam mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui kerangka berpikir untuk meniru cara kerja ekosistem (Pauli, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan budi daya rumput laut masyarakat pesisir

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Desa Tokorondo sebagai strategi peningkatan ekonomi yang sesuai dengan implementasi *blue economy* dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pendampingan serta pengawasan dalam kegiatan budi daya rumput laut. Adanya kegiatan budi daya rumput laut ini, masyarakat daerah pesisir Pantai biasanya memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam keberlangsungan hidup di sekitarnya. Selain memiliki kontribusi besar dalam keberlangsungan hidup, potensi wilayah pesisir dapat menjadi topangan perekonomian pada daerah di sekitarnya. Hal ini memberi pengaruh bahwa semakin berpotensi suatu wilayah terhadap keberlangsungan hidup masyarakat maka semakin besar pula peluang adanya eksploitasi sumber daya maupun tata cara pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya hayati lautan yang tidak tepat akan menyebabkan kerusakan lingkungan laut bahkan memungkinkan akan terjadinya kepunahan sumber daya laut (Mukaromah dan Rahmawati, 2023).

2. Tinjauan Literatur

Keberlanjutan. Konsep keberlanjutan memiliki arti yaitu kemampuan untuk mengikuti perkembangan masa kini tanpa mengorbankan hak-hak masa depan (Ahmad dan Lutfi, 2020). Keberlanjutan memiliki tiga dasar dimensi dalam implementasi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan atau yang biasa dikenal dengan istilah 3P (*Profit, Planet, People*). Ketiga dasar ini sangat penting dalam mempengaruhi keberlanjutan dimana keselarasan ketiganya harus terus diupayakan atau diwujudkan. Jika ada satu dasar yang tidak setara, misalnya aspek sosial atau lingkungan, maka kesenjangan atau masalah pasti akan terjadi. Keberlanjutan merupakan proses pembangunan dengan adanya optimalisasi dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan pembangunan sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Menurut Setianingties *et al* (2019) terdapat tujuan dasar dari keberlanjutan yaitu : (1) Untuk mengakomodir segala perubahan yang terjadi setelah berakhirnya era pembangunan millennium dengan memasukkan beberapa tujuan baru. (2) *Economically viable*, yaitu pembangunan keberlanjutan berjalan secara dinamis dan mempertahankan fungsionalitas serta keragaman sistem sambil memberikan banyak manfaat ekonomi. (3) *Socially-politically acceptable and culturally sensitive*, yaitu pembangunan yang dapat diterima secara sosial politik dan peka terhadap aspek budaya. (4) *Environmental friendly*, yaitu ramah lingkungan dengan mempromosikan citra produk termasuk hasil hutan bukan kayu (NWFPs) dan melindungi jasa alam yang disediakan oleh hutan.

Keberlanjutan Ekonomi. Pada dasarnya, keberlanjutan ekonomi tidak berdiri sendiri dalam menentukan indikator keberlanjutan ekonomi. Namun ada aspek lain yang mempengaruhi. Misalnya, pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, tidak hanya sumber daya alam tetapi juga sumber daya manusia. Sehingga dapat menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi dengan menata kembali sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi (Pratiwi *et.al*, 2018). Keberlanjutan ekonomi adalah salah satu konsep yang memperhatikan pentingnya kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi, serta pentingnya kesejahteraan (*well being*) untuk generasi mendatang. Konsep ini menunjukkan bahwa masyarakat dalam mempertahankan dan meningkatkan usaha sebagai perekonomian harus dapat menyeimbangkan kegiatan produksi dengan tetap menjaga sumber daya alam

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

sebagai tempat mengembangkan hasil-hasil produksi. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dalam keberlanjutan ekonomi selain itu, juga demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan agar terus dapat dimanfaatkan dari generasi ke generasi. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang. Menurut Fauzi dan Oktavianus (2014), ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi, Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi.

Blue Economy. Konsep *blue economy* mengandung unsur keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Keberlanjutan tersebut terkait pemanfaatan atau proses sumber daya alam secara efektif tanpa limbah, kepedulian sosial, inovasi, dan kreativitas. Untuk mengasah serta mewujudkan hal tersebut adalah melalui ilmu pengetahuan agar memiliki kemampuan dan peranan dalam memanfaatkan sumber daya alam melalui inovasi yang diperoleh dalam dunia pendidikan (Tripon, 2014). Konsep *blue economy* merupakan suatu gagasan pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan pengelolaan sumber daya alam lokal secara bijaksana dengan mendorong kreativitas, inovasi dan efisiensi, dan efektifitas tanpa menghasilkan limbah. Prinsip dasar dari konsep ini menjaga kelestarian ekosistem dengan menciptakan suatu ekonomi tanpa residu, limbah atau sampah. Bappenas (2020) mendefinisikan *blue economy* sebagai sebuah pendekatan untuk mendorong pengelolaan kelautan berkelanjutan dan konservasi sumber daya laut dan pesisir serta ekosistemnya yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, dan minimalisasi limbah. *Blue economy* dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan secara keseluruhan, sehingga sumber daya laut yang diolah akan dimanfaatkan secara optimal sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional. Pendekatan *blue economy* ditetapkan untuk memfasilitasi pembangunan yang tepat dan mengelola kepentingan yang bersaing dalam ruang laut tanpa menempatkan prioritas ekonomi dalam persaingan dengan kebutuhan ekologis atau sosial (Sambodo et al., 2023). Menilai pengembangan penerapan melalui konsep *blue economy*, digunakan beberapa prinsip dan indikator yang menjadi acuan, diantaranya:

Tabel 1. Prinsip dan Indikator *Blue Economy*

NO	Prinsip	Indikator
----	---------	-----------

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

1	Efisiensi Alam	Pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam secara efisien Tidak menggunakan emisi bahan-bahan berbahaya Tidak mengganggu serta merusak ekosistem alam
2	<i>Zero Waste</i>	Meminimalisir dan mengurangi adanya limbah yang diperoleh dari kegiatan perekonomian Pengelolaan limbah menjadi produk baru yang lebih ekonomis
3	Kepedulian Sosial	Terwujudnya program kemitraan di antara Masyarakat Adanya pengakuan pada hukum tradisional
4	<i>Multiple Revenue</i>	Memberikan banyak output produk dari satu bahan baku Terciptanya industry yang kreatif dan inovatif dalam meraih laba yang maksimal Pendapatan yang semakin meningkat Tersedianya lapangan pekerjaan baru

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti berupaya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap kegiatan, karakteristik, faktor-faktor tertentu yang menjadi pusat penelitian pada wilayah pesisir Desa Tokorondo. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian kualitatif diartikan sebagai metode penelitian yang dilakukan atas dasar filsafat postpositivisme dimana digunakan dalam meneliti suatu kondisi obyek secara alamiah (tidak dengan melakukan eksperimen). Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Poso tepatnya pada Desa Tokorondo. Sumber data yang digunakan yaitu berupa data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi Pustaka dan literasi yang bersumber dari melalui laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal serta media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Pada umumnya masyarakat pesisir termasuk masyarakat Desa Tokorondo secara sosial budaya merupakan suatu kelompok masyarakat dengan akar budaya yang dibangun atas paduan antara budaya maritim laut, pantai dan daratan yang berorientasi pasar. Kegiatan sehari-hari masyarakat pesisir termasuk Desa Tokorondo bekerja sebagai nelayan, pembudidaya tambak serta pembudidaya rumput laut. Wilayah luas budi daya rumput laut di Desa Tokorondo mencapai 80 hektar dengan 8 kelompok pembudidaya. 80 hektar luas tersebut setiap panen dapat menghasilkan 80 ton rumput laut kering yang siap untuk dijual. Sedangkan luas wilayah

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Desa Tokorondo yaitu 84,24 Km² dengan presentase 19,25. Selanjutnya jumlah penduduk Desa Tokorondo 2463 jiwa dengan kepadatan penduduk 60/Km².

Implementasi Blue Economy. Wilayah pesisir tentu memberikan peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkannya dalam meningkatkan perekonomian. Desa Tokorondo menjadi salah satu tempat yang memproduksi jumlah rumput laut tertinggi jika dibandingkan dengan desa-desa pesisir lainnya, hal ini dimanfaatkan untuk menjadi peluang bagi Masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Usaha budidaya rumput laut menjadi tantangan bagi masyarakat pembudidaya, tentu karena memiliki resiko yang cukup besar pada lingkungan terutama kondisi pantai. Tantangan pembangunan menjadi semakin kompleks akibat dari kompetisi ekonomi, perubahan iklim dan kependudukan. Hal tersebut mengharuskan adanya kebijakan pembangunan berkelanjutan pada sektor kelautan di wilayah pesisir secara berkelanjutan. Konsep *blue economy* menjadi salah satu kunci dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan lingkungan. Peningkatan limbah akibat kegiatan perekonomian serta eksplorasi yang berlebihan akan berdampak pada kerusakan lingkungan bahkan kepunahan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi *blue economy* di wilayah Desa Tokorondo dalam budi daya rumput laut secara bertahap telah dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok pembudidaya, baik melalui kesadaran masyarakat maupun pendampingan dari pemerintah. Penilaian implementasi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu berdasarkan prinsip dan indikator *blue economy*.

Prinsip Efisiensi Alam. Masyarakat dan pembudidaya rumput laut Desa Tokorondo sudah memanfaatkan dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan, sehingga efisiensi alam dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai. Berdasarkan hasil empiris peneliti bahwa masyarakat pembudidaya rumput laut di Desa Tokorondo dalam proses memproduksi selalu melakukan pemeliharaan serta menjaga kebersihan tempat budidaya rumput laut, karena semua alat dan teknik budidaya masih menggunakan proses tradisional. Selain itu, masyarakat pembudidaya di Desa Tokorondo menyadari pentingnya menjaga lingkungan sekitar untuk meningkatkan kualitas serta jumlah produksi rumput laut. Hasil penelitian bahwa pembudidaya dalam proses menanam hingga memproduksi rumput laut semuanya masih menggunakan bahan tradisional, seperti tali serta memanfaatkan penetrasi cahaya matahari. Penetrasi cahaya matahari dimanfaatkan untuk menjaga kecerahan perairan, hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan peningkatan kualitas lahan rumput laut yang baik. Selanjutnya, berdasarkan hasil empiris peneliti bahwa masyarakat pembudidaya rumput laut di Desa Tokorondo tidak menggunakan berbagai bahan teknologi dalam semua proses produksi, karena pembudidaya menyadari bahwa bahan-bahan teknologi yang berbahaya dapat mengganggu ekosistem dan sumber daya dalam meningkatkan produksi rumput laut. Berdasarkan indikator prinsip efisiensi alam dalam penelitian ini, para pembudidaya masih menggunakan bahan dan alat tradisional sehingga semua proses mulai menanam sampai pada produksi tidak mengganggu ekosistem alam sekitar maupun lahan budi daya rumput laut. Hasil ini sesuai dengan informasi yang didapatkan dari bapak Restu sebagai pendamping bidang budi daya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Poso: “*Dalam pendampingan kami berdasarkan hasil pengamatan bahwa cara pembudidaya mulai dari proses pengambilan sampai pada penanaman kembali sudah sesuai*”

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

dengan konsep blue economy, karena semua proses masih menggunakan cara dan bahan tradisional”

Zero Waste. Proses budi daya rumput laut dalam kegiatan perekonomian di Desa Tokorondo sampai pada kegiatan pemasaran tidak menciptakan adanya limbah yang dapat mengganggu dan merusak lingkungan. Berdasarkan hasil empiris bahwa rumput laut yang diproduksi kemudian dilakukan pengeringan dengan cara menjemur yaitu memanfaatkan sinar matahari di siang hari, setelah benar-benar kering rumput laut langsung dipasarkan. Dapat diartikan bahwa pembudidaya telah meminimalisir adanya limbah pada rumput laut. Informasi ini juga didapatkan dari bapak Agus salah satu anggota pembudidaya: *”Rumput laut yang di angkat dari laut atau diproduksi kemudian diproses dengan melakukan pengeringan, hanya itu saja lalu di jual langsung kepada pembeli atau pembeli langsung datang untuk membeli”* informasi ini menunjukkan bahwa kurangnya dampak dari limbah yang dilakukan oleh pembudidaya.

Kepedulian Sosial. Masyarakat pembudidaya rumput laut terbagi dalam beberapa kelompok, bukan hanya kelompok pria tetapi ada juga kelompok para ibu-ibu yang membantu budidaya rumput laut. Kemitraan antara kelompok secara internal dapat membantu peningkatan proses budidaya rumput laut sedangkan kemitraan eksternal yaitu kepada pembeli dapat memperlancar jalur distribusi dan pemasaran hasil produksi. Kemitraan ini memberikan manfaat dari segi bisnis untuk meningkatkan perekonomian keluarga serta menciptakan kepedulian sosial masyarakat. Kemitraan bersama pemerintah baik dalam pendampingan maupun evaluasi selalu dilakukan untuk memberikan informasi dan pengembangan dalam proses budi daya. Informasi ini juga didapatkan dari bapak Restu sebagai pendamping bidang budi daya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Poso: *”Kami selalu mendukung dan memfasilitasi Masyarakat pembudidaya dengan berbagai bantuan yang terus berjalan sampai saat ini antara lain bantuan berupa tali dan bibit yang berkualitas unggul”* Kegiatan budidaya rumput laut oleh masyarakat Desa Tokorondo merupakan usaha yang dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi untuk mempertahankan keberlanjutan perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan budidaya tersebut dilakukan sesuai dengan norma-norma tradisional yang belaku seperti menjaga ekosistem alam, memanfaatkan sumber daya dengan baik serta adanya perkembangan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Kesadaran dan perkembangan masyarakat dalam membudidayakan rumput laut sudah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 B Ayat 2 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Multiple Revenue. Budi daya rumput laut merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat Desa Tokorondo. Berdasarkan hasil empiris bahawa pembudidaya rumput laut langsung memasarkan hasil produksi kepada para pembeli untuk diolah kembali menjadi berbagai produk, selain dipasarkan hasil produksi juga digunakan untuk kebutuhan keluarga menjadi bahan makanan.

Proses budi daya rumput laut bagi masyarakat Desa Tokorondo menciptakan lapangan

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

pekerjaan baru untuk memaksimalkan keberlanjutan perekonomian, selain itu kegiatan budidaya tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan kreativitas untuk memperkuat kemandirian masyarakat dalam berusaha mempertahankan kehidupan.

5. Kesimpulan

Implementasi konsep *blue economy* di wilayah pesisir Kabupaten Poso yaitu Desa Tokorondo terlaksana dengan baik dan sesuai konsep. Hampir seluruh prinsip dan indikator *blue economy* terlaksana. Namun, ada indikator yang memang sama sekali tidak mempengaruhi yaitu tidak adanya limbah yang dikelola untuk menjadi produk yang baru dan ekonomis. Hal ini disebabkan pembudidaya langsung menjual (memasarkan) hasil produksi kepada pembeli, dapat disimpulkan pembudidaya hanya memproduksi dan tidak mengolah rumput laut tersebut. Ekosistem laut dan lahan yang tetap terjaga dengan baik telah meningkatkan sumber daya laut sebagai keberlanjutan perekonomian masyarakat Desa Tokorondo, demikian pula kesadaran yang tinggi dalam mengimplementasikan konsep *blue economy* agar menjadi modal bagi generasi yang akan datang untuk dapat mempertahankan budaya dan meningkatkan sumber pendapatan.

Referensi

- Ahmad, Y. & Lutfi, P. (2020). Tinjauan Konsep Keberlanjutan Pada Kawasan Pemukiman Summarecon Bekasi Dalam Aspek Sosial. *Jurnal Arsitektur PURWARUPA*, 4 (2), 23-30.
- Arli. (2019). *Pengembangan Industri Rumput Laut Indonesia-Kesediaan Bahan Baku Seminar Nasional Sinergitas Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional*.
- Bappenas. (2021a). Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation. In *Jurnal Teknik Elektro* (Vol. 1, Issue 2).
- Dahuri, R. (2005). *Potensi Ekonomi Kelautan*. Republika. Republika. 13 Desember 2005.
- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). The Measurement of Sustainable Development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 15(1), 68. <https://doi.org/10.23917/jep.v15i1.124>.
- Nurhayati, S. (2013). Blue and Green Economy (BGE) Policy and Their Impact to Indonesian Community Welfare. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 37-42.
- Pasaribu, A. (2017). *Konsep Blue Economy Sumber Pertumbuhan Baru di Indonesia*. Ekuilibria.
- Pauli, G. (2010). *The Blue Economy 10 Years 100 Innovations 100 Million Jobs*. Paradigm Publications.
- Pratiwi, N., Santosa, D.B. & Ashar, K. (2018). Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*. 18 (01), 1-13.
- Radiarta, I. N., Erlania, E., & Haryadi, J. (2015). Analisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP). *Jurnal*

Seminar Nasional FMI 2024 Manado

Prosiding



e-ISSN: 3026-4499
Vol. 2
5-7 November 2024

Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 10(1), 47–59.

Sambodo, L. A. A. T., Putri Pane, D. D., Pertamawati, L. H., Maftukhah, S., Firdaus, I. T., Wikapuspita, T., Harianto, S. K., Nurrahmani, S. M., Nugrahaeni, T. A., Mukhairiq, M. T., Alfarisy, M. A. R., Manullang, R. A. M., Riyanto, R., Artika, K., Nurhaditia, F., & Tamadhika, R. (2023). *Indonesia Blue Economy Roadmap*. Ministry of National Development Planning/ National Development Planning Agency.

Setianingtias, R., Baiquni, M. & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. 27 (2), 61-74.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tripon, A. 2014. Innovative technology for sustainable development of human resource using nonformal and informal education. *Procedia Technology*. XII(2014): 598-603.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)